

## ***Kajian Manajemen Jaminan Mutu Pendidikan Menurut Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id***

Oleh:

**Syafiyqun Fawwaz, Mahfida Inayati dan Rahmawati**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia

*Email: syefisyamilah27@gmail.com.*

### ***Abstract***

*Accreditation as an educational unit will encourage schools to prepare themselves, not only for self-evaluation for the good of the future, but also as a means of public accountability. Quality education is a process of establishing and fulfilling management standards consistently and continuously, so that both consumers, producers and other interested parties obtain satisfaction. The education quality assurance system in activities focuses on continuous quality improvement, by measuring and assessing the quality of the education system, the performance of educational institutions, and the quality of study programs. According to Dr. Muhsin al-mahdi sa'id accreditation is an activity to assess the feasibility of a program in an educational unit based on predetermined criteria. In the quality assurance process there are several statements that must be fulfilled, as well as in the accreditation itself, which includes procedures, assessments and components that must be fulfilled, so that later the quality assurance management of education in educational institutions will develop well and receive a positive response. positive from the environment around the educational institution*

***Keywords: Management, Quality Assurance, Education Quality***

### **A. Pendahuluan**

Manajemen mutu pendidikan dikaitkan dengan dua peran besar lainnya, yaitu Standar kualitas dan akreditasi pendidikan, dimana standar menjadi pintu masuk nyata untuk mencapai pendidikan berkualitas di sebuah institusi, begitu pun akreditasi menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan itu telah mencapai standar mutu yang diharapkan, sehingga konsep jaminan mutu itu bisa terealisasikan dengan melihat dari standar kualitas dan akreditasi pendidikan sekolah tersebut.<sup>1</sup> Manajemen mutu sebagai suatu sistem untuk membantu satuan pendidikan untuk mewujudkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, semua aktivitas kerja yang harus di selesaikan untuk memperthankan mutu yang diinginkan.<sup>2</sup> Yang nantinya pasti akan membawa lembaga pendidikan tersebut ke jenjang yang lebih signifikan dengan mengembangkan sistematika mutu pendidikan yang ada di lembaga tersebut.

---

<sup>1</sup>Rhusdi Ahmad Tuaimah, *Al-Judah Al- Syamilah Fi Al-Ta'lim* (Yordania: Dar Al Masirah, 2006), 23.

<sup>2</sup> Erwin firdaus, *manajemen Mutu pendidikan* (Yayasan kita menulis, 2021). 3.

Jaminan mutu itu akan tereliasasikan dengan baik dan terarah ketika komponen-komponen di dalamnya sudah terpenuhi ialah standar mutu dan akreditasi pendidikan<sup>3</sup> yang dimana itu semua membutuhkan kerja sama komponen setiap lembaga sehingga bisa mencapai kea rah yang telah di inginkan dan di tunggu oleh banyak orang. Akreditasi menjadi satuan pendidikan akan mendorong sekolah untuk mempersiapkan diri, selain untuk evaluasi diri demi kebaikan masa datang juga sebagai alat akuntabilitas publik. Tujuan akreditasi adalah agar pihak luar, pengguna jasa pendidikan, mengetahui mutu pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik mengetahui mutu sekolah di mana mereka sedang belajar, orang tua mengetahui mutu dan reputasi perguruan di mana anak mereka belajar, pasar atau dunia kerja juga mengetahui ke mana mereka harus memilih dan merekrut tenaga kerjanya, lebih dari itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung, mutu pendidikan nasional<sup>4</sup>.

Dari pemaparan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya jaminan mutu pendidikan dapat terealisasikan dengan baik ketika standar mutu dan akreditasi pendidikan itu sudah rapi, sehingga akan adanya daya Tarik tersendiri bagi masyarakat ke lembaga pendidikan tersebut, salah satu tokoh yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id yang bisa di koreliasasikan dengan pendapat beberapa tokoh. Sehingga pada artikel ini akan mengulas secara menyeluruh terkait konsep mutu pendidikan menurut Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id

## B. Pembahasan

Tidak dapat di pungkiri sekali lagi bahwasanya dengan adanya sistem mutu di lembaga pendidikan akan berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan pendidikan tersebut, karena selain menarik peminat masyarakat lembaga tersebut juga akan mempunyai daya nilai yuang tinggi ketimbang dengan lembaga yang kurang dalam mutu pendidikannya. mutu pendidikan berkualitas atau tidak bepusat terhadap pengelola dan penerapannya terhadap lembaga pendidikan<sup>5</sup>. Manajemen mutu terpadu sebagai filosofi dan sekumpulan petunjuk prinsip-prinsip yang menjadi landasan untuk perbaikan terus-menerus dari suatu organisasi. Manajemen mutu terpadu adalah penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu material dan pelayanan yang dipasok pada suatu organisasi, semua proses dalam organisasi dan memenuhi derajat kebutuhan pelanggan baik

---

<sup>3</sup> Tuaimah, *Al-Judah Al- Syamilah Fi Al-Ta'lim*, 24.

<sup>4</sup> Erwin Firdaus, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: yayasan Kita Menulis, 2021), 74.

<sup>5</sup> Mahfida Inayati, Mulyadi, and Ali Nurhadi, "Analisis Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Pesantren Melalui Manajemen Humas," *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 229-42, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/1631/pdf>.

pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Manajemen mutu terpadu mengintegrasikan teknik manajemen fundamental, usaha-usaha perbaikan yang ada dan alat teknikal di bawah suatu disiplin pendekatan yang berfokus pada perbaikan terus-menerus.<sup>6</sup>

Pada dasarnya manajemen mutu terpadu berfokus pada perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manajemen mutu berorientasi pada proses untuk mengintegrasikan semua sumber daya manusia, pemasok (supplier) dan para pelanggan (*customer*).<sup>7</sup>

### 1. Mutu Pendidikan Menurut Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id

Standar mutu merupakan barometer kemajuan dan keberhasilan pengembangan manajemen lembaga pendidikan, terutama dengan adanya akreditasi lembaga pendidikan yang harus mempunyai sistem penjaminan mutu internal dan external sebagai standar kemajuan manajemen lembaga pendidikan.<sup>8</sup> Tercapainya kemajuan dalam semua aspek dalam pendidikan sangat diharapkan oleh semua pihak dalam masyarakat lebih – lebih dalam peningkatan mutu pendidikan melalui cara berbagai inovasi pembelajaran dalam semua jenjang dan jalur pendidikan.<sup>9</sup> Begitu pula standar mutu dapat di artikan sebagai suatu ukuran yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa produsen.<sup>10</sup> sehingga nantinya input yang di masukan akan menghasilkan output yang baik, sehingga kepuasan pelanggan dengan kinerja yang sudah di lakukan oleh tenaga pendidik akan mendapatkan hasil yang komprehensif.

Konsep Jaminan Mutu menurut Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id<sup>11</sup> ialah di mulai dari tiga ilmuan matematikawan ialah : Edwards Deming, Walter Sowhart, Joseph Puran Joseph Janan. Edwards Deming mengkritik model manajemen ilmiah Taylor yang terkenal, karena kontrol jaminan kualitas yang didasarkan pada pengukuran produk. Menurutnya Proses manajemen yang baik dilakukan berbeda dengan pekerjaan, akan tetapi jaminan kualitas akan menjadi akibat wajar, sehingga jaminan kualitas di tetapkan yang pada nantinya dapat mencapai peningkatan terus-menerus dalam *output*, dan hanya melalui teknik ini

---

<sup>6</sup> Ahmad, *Manajemen Mutu Terpadu* (Makasar: CV Nas Media Pustaka, 2020), 9.

<sup>7</sup> Ahmad, 10.

<sup>8</sup> Fathor Rachman, *Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Ircisod, 2021).141

<sup>9</sup> Mahfida Inayati and Nurul Zainab, "Pengembangan Bahan Ajar Kerangka TPACK Berbasis Video Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa," *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2023): 96–105, <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia>.

<sup>10</sup> Supadi, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021).18

<sup>11</sup> Hassan Hussein Al-Bailawi, *Al-Judah Asy-Syamilah Fi Al-Ta'lim* (Yordania: Dar Al-Masirah, 2006), 34.

administrator dapat menemukan masalah dan menghilangkannya dalam proses yang mengalir terus menerus selama produksi.

Dalam referensi lain Daming mengatakan bahwasanya manajemen mutu total adalah sebuah teknik manajemen yang efisien yang memerlukan keterlibatan penuh semua karyawan pada semua tingkat organisasi, sehingga mewakili budaya organisasi, yang dimana perubahan pertama harus terjadi dalam sikap dan kegiatan manajemen, dalam organisasi dan pemantauan proses pendidikan, dalam evaluasi hasil, dalam budaya komunikasi, di atmosfer sekolah, dan terutama di bidang interpersonal sekolah.<sup>12</sup> Walter Sowhart mempresentasikan model statistik untuk kontrol jaminan kualitas. Bahwa model yang dikembangkan oleh Sowhart ini memiliki kekuatan yang luar biasa dalam meningkatkan kemampuan produksi pekerja, dan setelah Perang Dunia II.<sup>13</sup>

Begitu juga dengan Joseph Purn<sup>14</sup> dia mengatakan bahwasanya jaminan kualitas sebagai kesesuaian untuk digunakan. Dia menekankan bahwa tugas utama jaminan kualitas adalah mengembangkan program untuk produksi atau layanan yang memenuhi kebutuhan dan mengandalkan perencanaan di dalam institusi, dan dia percaya bahwa jaminan kualitas dapat dicapai ketika pekerja mampu menghasilkan produk. Dalam sebuah buku lain Josep Purn mengatakan dan mendefinisikan bahwasanyab manajemen mutu sebagai suatu kumpulan aktivitas yang berkaitan dengan kualitas tertentu dengan karakteristik

- a. Mutu menjadi bagian dari setiap agenda manajemen atas.
- b. Sasaran kualitas dimasukkan dalam rencana bisnis.
- c. Jangkauan sasaran diturunkan dari *benchmarking*, fokus pada pelanggan dan pada kesesuaian kompetisi; di sana adalah sasaran untuk peningkatan kualitas tahunan.
- d. Sasaran disebarakan ke tingkat yang mengambil tindakan.
- e. Pelatihan dilaksanakan pada semua tingkat.
- f. Pengukuran ditetapkan seluruhnya.
- g. Manajer atas secara teratur meninjau kembali kemajuan dibandingkan dengan sasaran.
- h. Penghargaan diberikan untuk performansi terbaik.

---

<sup>12</sup> Abdul Hadi, "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan," *Jurnal Program Studi PGMI 5*, no. 2 (2018): 140.

<sup>13</sup> Hadi, 145.

<sup>14</sup> Hadi, 135.

i. Sistem imbalan (*reward system*) diperbaiki.<sup>15</sup>

Mereka bertiga sama sama bekerja di bell telephone di jepang dan mengembangkannya di sana, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang mencolok dari berbagai matematikawan di atas sehingga pada saat tahun 70-an Edwards Deming pindah ke amerika serikat dan membentuk awal dari gerakan manajemen jaminan kualitas di sana, Jepang tetap mendukung gerakan ini, yang mengambil dimensi lain dari Perkembangan di sana kemudian, dan dari Amerika Serikat gerakan jaminan kualitas pindah ke Aurea, akan tetapi pada tahun 80-an Konsep jaminan kualitas pindah ke bidang pendidikan di Amerika pada tahun 1981, kemudian Malcolm Baldrig memunculkan Penerapan prinsip-prinsip jaminan kualitas Komprehensif ialah:

- a. Administrator dan anggota fakultas semuanya harus disebutkan untuk mencapai jaminan kualitas
- b. Fokusnya harus pada siswa dengan kegagalan daripada mempelajari kegagalan setelah fakta.
- c. Penggunaan kontrol statistik secara akurat untuk meningkatkan proses manajemen dan pengembalian siswa.
- d. Pelatihan pertama sangat penting untuk manajemen mutu, dan setiap orang dalam organisasi harus berlatih untuk jaminan kualitas.
- e. Perlunya menyepakati standar dan kondisi yang setiap tahun menentukan jaminan kualitas operasi dan output.
- f. Di Inggris, konsep ini dipindahkan ke bidang pendidikan dan standar jaminan kualitas diterapkan di dalamnya dengan awal tahun sembilan puluhan, ketika Komite Wakil Presiden dan Kepala Universitas.

Dari beberapa pandangan tokoh di atas bahwasanya itu sangat memungkinkan jaminan mutu pendidikan dapat terealisasikan dengan baik, sesuai dengan pendapat beberapa tokoh diantaranya; Menurut Ikezawa mengartikan bahwasanya sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistic yang di bangun berdasarkan jaminan kualitas, *teamwork*, produktifitas dan kepuasan pelanggan. Sedangkan santoso sebagaimana di kutip djiptono dan Diana mengartikan sebagai sistem manajemen yang mengangkat jaminan kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.

---

<sup>15</sup> Ahmad, *Manajemen Mutu Terpadu*, 10.

Sallis juga menjelaskan bahwasanya mutu pendidikan mempunyai beberapa unsur, yaitu 1. kepemimpinan dan strategi yang meliputi, komitmen, kebijakan mutu, analisis operasional, misi dan rencana strategi, serta kepemimpinan, seperti firman Allah yang berbunyi:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

*Artinya : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Ali Imran 3:110)*

Sistem dan prosedur yang meliputi, efisiensi administrasi, pemaknaan data, dan biaya mutu, 3. Kerja tim, 4. Penilaian diri sendiri.<sup>16</sup> Akreditasi Pendidikan juga berkaitan erat dengan jaminan mutu pendidikan karena akreditasi merupakan Proses perizinan dalam akreditasi pendidikan yang merupakan mekanisme untuk menjamin mutu, dan ini tidak diperlukan untuk kepentingan sendiri, tetapi dengan tujuan untuk menjamin mutu dan memberikan standar kondisi mutu dan keberhasilan dalam input, proses dan kelulusan Lembaga Pendidikan.

Ada beberapa hal yang membuat akreditasi sebagai penunjang standar mutu pendidikan diantaranya ialah:

- a. Akreditasi pendidikan adalah pintu masuk untuk mencapai jaminan kualitas total, dan merupakan insentif untuk meningkatkan proses pendidikan secara keseluruhan dan sumber ketenteraman bagi komunitas lulusan lembaga ini, dan oleh karena itu, tidak mewakili ancaman terhadapnya .
- b. Akreditasi tidak bertujuan untuk menentukan peringkat atau peringkat institusi pendidikan Ketergantungan tidak dihitung, dimulai dengan kebebasan akademik atau paparan nilai-nilainya.
- c. Akreditasi adalah untuk mengukuhkan dan mendorong lembaga pendidikan untuk memperoleh kepribadian dan identitas yang berbeda berdasarkan sistem standar dasar dalam jumlah jaminan kualitas yang disepakati, dan ini tidak berarti penghapusan identitasnya.
- d. Akreditasi tidak hanya menyangkut produk akhir dari proses pendidikan, tetapi juga memperhatikan semua aspek dan komponen lembaga pendidikan.

<sup>16</sup> A.A. Musyaffa, *Total Quality Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Madrasah* (Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2019).8

e. Akreditasi adalah pintu masuk untuk mendukung lembaga pendidikan, pada saat itu, dan untuk membawa mereka ke tingkat jaminan kualitas yang diinginkan.

Berdasarkan pembahasan jaminan mutu pendidikan yang di kemukakan oleh Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id bahwasanya dari perspektif beberapa tokoh ada banyak persamaan antara yang di kemukakan oleh Dr. Muhsin Al-Mahdi Sa'id dengan para tokoh. Dimana mutu pendidikan merupakan suatu proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga baik dari konsumen, produsen, dan pihak yang lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Sesuai dengan PP 19, tahun 2005 pasal 91, menyatakan bahwa: setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan, yang pada akhirnya lembaga pendidikan sudah menetapkan standar mutu, yang tidak hanya di nyatakan pada ketentuan pengakuan terakreditasi, tetapi juga harus di lengkapi dengan suatu mekanisme yang jelas sehingga mutu di lembaga pendidikan itu dapat terealisasi sesuai dengan mekanisme yang jelas.<sup>17</sup>

Sebagaimana tertulis dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutu merupakan (ukuran) baik-buruknya kualitas suatu objek. Menurut Suhardan, mutu diartikan sebagai kondisi terkait dengan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Sedangkan menurut anonim, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan beberapa definisi tentang mutu yang di kemukakan oleh para pakar maka dapat dideskripsikan, bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa dari produsen.<sup>18</sup>

Sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang penjaminan mutu pendidikan, yang kemudian di implementasikan kedalam sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP). Sebagaimana disebutkan di dalam peraturan menteri nasional pendidikan nomor 63 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa "sistem penjaminan mutu pendidikan yang selanjutnya disebut

---

<sup>17</sup> Sri Uchtiwati dan Irwani Zawawi, "Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Berstandar Nasional," *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan* 2 no 1 (t.t.): Januari, 2014.52

<sup>18</sup> Supadi, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jawa Timur: UNJ Press, 2021), 18.

SPMP yang menjadi subsistem dari sistem pendidikan nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.<sup>19</sup>

Secara kelembagaan, sistem penjaminan mutu pendidikan diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi dari manajemen pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan, mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan atau regulasi. Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam kegiatan, fokus terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan, dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. Sistem penjaminan mutu pendidikan dapat dipandang sebagai instrument kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan, untuk mencapai akuntabilitas sesuatu pendidikan terhadap masyarakat atau publik.<sup>20</sup> Maka perlu menata suatu manajemen pendidikan baik dalam lingkup sekolah maupun madrasah upaya manusia meningkatkan mutu kualitas lembaga pendidikan yang didapatkan melalui proses kegiatan yang dirancang.<sup>21</sup>

Dalam penerapan sistem penjaminan mutu, proses yang terjadi menggambarkan semua kegiatan yang menjamin produk yang di hasilkan melalui proses yang di janjikan, sehingga dengan adanya sistem ini kebutuhan akan kegiatan inspeksi yang terbatas hanya memisahkan prosuk yang bagus dan jelek dan di eliminasi atau di kurangi.<sup>22</sup> Robinson memandang jaminan mutu sebagai program kegiatan yang di lakukan oleh sebuah organisasi untuk membuat kualitas produk atau jasa memenuhi standar yang di tentukan, kualiptas yang di inginkan dapat di capai dengan antisipasi dan penghindaran kesalahan yang memungkinkan manajemen dalam organisasi akan di fokuskan dalam penjadwalan kerja, memerinci prosedur, monitoring dan evaluasi proses, mendokumentasikan dan meninjau oprasional strategi, dan mengkomunikasikan keputusan untuk pencapaian tujuan yang di tetapkan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Sulaiman dan Udik Budi Wibowo, "Implementasi sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gajah Mada," *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no 1 (April 2016).18

<sup>20</sup> Khoirul Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidika Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah," *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan agama islam*, November 2018, 01, No 01.42

<sup>21</sup> Mahfida Inayati Achmad, Ali Nurhadi, "Analisis Stategi Dalam Pengembangan Rencana Kerja Madrasah," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 2 (2023): 179–86.

<sup>22</sup> Danny Mairawan, "Penjmainan mutu satuan pendidikan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan secara nasional dalam otonomi pendidikan," *Jurnal Educationist* IV, No. 2 (Juli 2010).128

Venkaiyah melihat jaminan mutu sebagai prinsip manajemen yang menjamin perlakuan yang adil dalam perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan semua fungsi dan kegiatan organisasi untuk tujuan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Harvey mendefinisikan jaminan mutu sebagai proses penyediaan yang di butuhkan input sumber daya, memastikan control yang efektif dan meningkatkan proses untuk tujuan meningkatkan kualitas *output* untuk memenuhi standar yang di tentukan dan memenuhi akuntabilitas publik.

Rouf berpendapat bahwa jaminan mutu dalam pendidikan adalah perbaikan terus menerus dalam metode menerapkan berbagai aspek program dan kegiatan pendidikan di sebuah lembaga pendidikan untuk memenuhi keinginan para pemangku kepentingan yang semuanya berada pada posisi yang sangat urgen di bidang pendidikan. Yang mana perspektif ini di dasarkan pada prinsip yang dikatakan daming yang diamana dari perbaikan terus menerus, yang secara fundamental di dasarkan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keputusan.<sup>23</sup>

## 2. Konsep Manajemen Mutu

Konsep Manajemen Mutu merupakan pengembangan konsep mutu yang terus berkembang dari masa ke masa. Menurut Slamet Margono dalam perkembangan Manajemen Mutu terbagi dalam enam era yaitu era.tanpa mutu, era inspeksi mutu, era Statistical quality control, era quality assurance, Era Strategis Quality Management/ Manajemen Mutu Terpadu dan Era Gugus Kendali Mutu Quality Control Circle.<sup>24</sup>

- a. Era Tanpa Mutu Era tanpa mutu dimulai sebelum.abad ke-18. Pada era ini setiap di mana produk dan jasa yang dibuat atau disediakan tidak memperhatikan mutu atau kualitas produk. Keadaan ini hanya mungkin terjadi jika Lembaga/organisasi yang membuat produk/ penyedia layanan jasa tidak memiliki pesaing. artinya tidak ada monopoli pada saat itu (Ibrahim, 2021)
- b. Era Inspeksi (Inspection), Era ini berlangsung sekitar tahun 1800-an dinegara-negara Eropa Barat. Pada saat itu produsen mulai mendapatkan pesaing sementara produksi dilakukan secara masal. Inspeksi dilakukan saat memilih produk akhir yang akan dipasarkan. Pada era ini, pihak produsen kurang memperhatikan mutu dalam artian perhatian produsen sangat terbatas.

---

<sup>23</sup> A. Suhardi, "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah," *Manajemen Pendidikan Islam* 5, No. 1 (2019).376

<sup>24</sup> Agung Nugroho Catur Saputro, dkk, *Manajemen Mutu Terpadu Untuk Pendidikan*, ( Yayasan Kita menulis, 2022),48-52

- c. Era Pengendalian Mutu secara statistik (Statistical Quality Control) Era Pengendalian mutu dimulai sekitar tahun 1930, di mana konsep pengendalian mutu diperkenalkan oleh Walter A. Shewart. Hal ini terjadi karena pada era inspeksi terjadi penyimpangan atribut produk yang dihasilkan (cacat). Pihak inspeksi tidak dapat mendeteksi apakah penyimpangan tersebut disebabkan karena kesalahan pada produksi atau hanya karena kebetulan. Hal ini menyebabkan sulit untuk melakukan perbaikan terhadap produksi.
- d. Era Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Era Penjaminan Mutu adalah pengembangan dari Era pengendalian mutu. Jika saat era pengendalian mutu hanya berfokus pada produk, di era ini meluas menjadi penjaminan mutu pada tahap desain serta ada koordinasi dengan bidang pelayanan jasa. Pada era ini, semakin disadarinya bahwa penentuan mutu produk memerlukan koordinasi dan kebijakan manajemen yang melibatkan seluruh pihak terkait. Hal ini juga terjadi karena adanya perkembangan ilmu ekonomi, di mana ditemukan konsep biaya. Hal lain yang mendasari pengembangan penjaminan mutu adalah terdapat beberapa kesulitan dalam interpretasi pengambilan keputusan terhadap rekomendasi hasil analisis statistis.
- e. Era Strategis Quality Management/ Manajemen Mutu Terpadu Sebagaimana diketahui konsep MMI bermula dari Jepang dengan pengembangan konsep mutu Deming. Keberhasilan Jepang yang sangat pesat dibidang kualitas menjadi pusat perhatian perusahaan perusahaan dari berbagai negara.
- f. Era Gugus Kendali Mutu/Quality Control Circle Setelah beberapa era sebelumnya, era gugus kendali mutu merupakan era di mana penjaminan mutu memiliki kendali sendiri. Konsep ini diperkenalkan oleh Prof. DR. Kaoru Ishikawa yang dikenal dengan Gugus.Kendali mutu (Quality Control Circle) pada tahun 1962, yang mana sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini telah dikenal sebagai masa pemantapan dan pengembangan (New Quality Creation). Gugus kendali mutu adalah suatu mekanisme kerja yang menerapkan sistem monitoring dan evaluasi terhadap berbagai hasil yang diperoleh secara terus menerus dalam sebuah organisasi Lembaga. Kesadaran setiap anggota organisasi harus memiliki kesadaran penuh dan motivasi yang kuat dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi agar organisasi tempat bernaungnya tetap konsisten dan bertahan.

Yang dimana dari semua pendapat tokoh yang di jadikan perbandingan dengan tokoh yang ada di buku hasan al-bailawi tidak terlalu berbeda, bahkan ada

di salah satu referensi mengatakan bahwa sanya Edward daming adalah sebagai pencetus pertama konsep manajemen mutu pendidikan, dan di ikuti oleh beberapah tokoh lainnya yang mana tidak jauh beda dari perspektif dari Edward daming.

Mutu pendidikan berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, mutu pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Terpenuhinya standar minimal pendidikan yang merupakan Standar Nasional Pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan mutu pendidikan.<sup>25</sup> Paradigma mutu dalam konteks pendidikan menurut Depdiknas (2001) mencakup input, proses, dan output. Lebih jauh dijelaskan bahwa input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Yang dimaksud sesuatu adalah berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan harapan sebagai pemandu bagi keberlangsungan proses.<sup>26</sup> Begitu pentingnya, pendidikan dalam kehidupan bangsa, semua pihak dalam masyarakat sangat berharap banyak terhadap mutu pendidikan kita dengan berbagai inovasi pembelajarannya dalam semua jenjang dan jalur pendidikan.<sup>27</sup>

Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (seperti ketua, dosen, konselor, peserta didik) dan sumber daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang bahan-bahan, dan sebagainya). Sedangkan input perangkat meliputi: struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, program, dan lain sebagainya. Input harapan harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan input. semakin tinggi pula mutu input tersebut.<sup>28</sup> Proses pendidikan merupakan proses berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan

---

<sup>25</sup> Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah."<sup>46</sup>

<sup>26</sup> Supadi, *Manajemen Mutu Pendidikan*, 19.

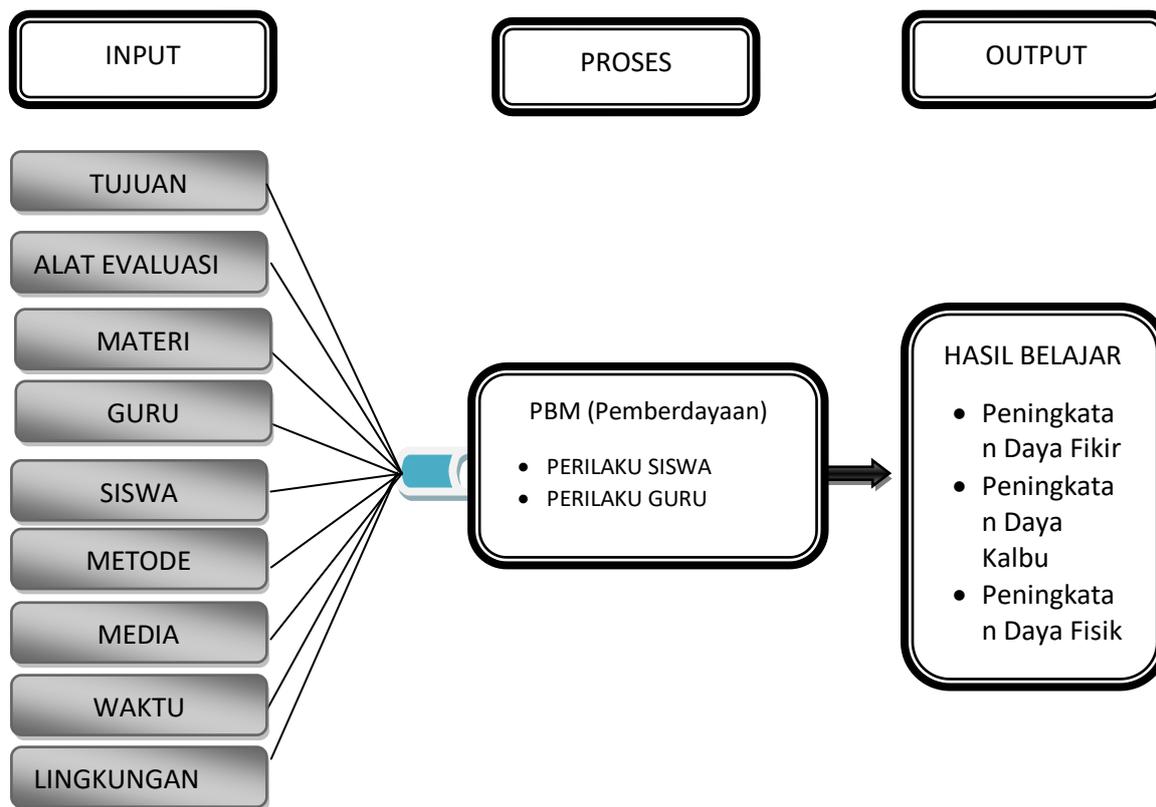
<sup>27</sup> Mahfida Inayati, "Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 144–59, <https://www.researchgate.net/publication/320726603>.

<sup>28</sup> Supadi, 22.

penyerasian serta pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*). mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik.<sup>29</sup>

Menurut Chon *output* pendidikan dapat membentuk empat kemampuan di bawah ini:

- a. *Basic skills* (kemampuan dasar). Contohnya, keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan berhitung dan membaca
- b. *Vocational skills* (kemampuan kejuruan). Yang dapat digunakan untuk bekal hidup di masyarakat (*lifeskill*).
- c. *Creativity* (kreativitas), yaitu ukuran untuk menilai keberhasilan sekolah, dengan bertambahnya kreativitas anak (manfaat investatif).
- d. *Attitude* (sikap). Salah satu fungsi sekolah adalah membentuk sikap yang "baik: Sikap ini meliputi untuk sendiri, teman, keluarga, komunitas tertentu, masyarakat sekolah, dan, dunia di mana kita hidup."<sup>30</sup>



Sehingga dapat di tarik garis besar cakupan manajemen mutu pendidikan di lembaga pendidikan itu dapat terlihat jelas dan bersinar ketika cakupan dari input,

<sup>29</sup> Ibid,19

<sup>30</sup> Arbangi, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jakarta: PT Adhitiya Andrebina Agung, 2016), 68.

proses dan output nya sangat bagus karena ketiga cakupan itu sendiri menjadi daya jual terhadap siswa dan masyarakat di sekitar.

Selain standar kualitas yang dapat menjamin manajemen mutu pendidikan di dalamnya juga ada akreditasi pendidikan yang mana keduanya adalah salah satu komponen yang sangat urgen sesuai dengan pendapat dari Husain al-bailawi dan beberapa refrensi lain, yang mana akreditasi adalah pagu (*benchmark*) yang sangat positif dalam upaya untuk semakin meningkatkan mutu sekolah. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.<sup>31</sup>

Sehingga di berbagai Negara, termasuk Indonesia menjadikan akreditasi sebagai salah satu cara atau metode yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, dan manajemen mutu secara keseluruhan. Di Indonesia, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal, pada setiap jenjang dan jenis (Pasal 60 PP Nomor 19/2005) melalui pendekatan audit, pengukuran, dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).<sup>32</sup>

Berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi ini, pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sebagai badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.<sup>33</sup> Dengan kebijaksanaan ini diharapkan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah dapat dilakukan secara objektif, adil, profesional, komprehensif, dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dasar hukum pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Aulia Ar Rakhman Awaluddin, "Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu upaya Penjaminan Mutu," *Jurnal SAP pendidikan di Indonesia* 2, No. 1 (Agustus 2014).13

<sup>32</sup> Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah."46

<sup>33</sup> Awaluddin, "Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu upaya Penjaminan Mutu."16

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XVI Bagian Kedua pasal 60 tentang Akreditasi.
- b. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 dan 87.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 tentang akreditasi sekolah.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 039/O/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS) yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah.

Sehingga dapat ditarik garis besar bahwasanya ini bergantung bagaimana sektor lembaga pendidikan itu bisa terus mengembangkan manajemenmutu nya sehingga tetap di pandang terhormat oleh masyarakat dan pihak lainnya.

Adapun dalam akreditasi sendiri terdiri dari beberapa komponen dan tahapan yang harus terpenuhi yang mana Komponen akreditasi itu meliputi:<sup>34</sup>

- a. kurikulum dan program pembelajaran.
- b. administrasi dan manajemen.
- c. organisasi kelembagaa.
- d. sarana dan prasarana.
- e. Ketenagaan.
- f. Pembiayaan.
- g. peserta didik.
- h. peran serta masyarakat
- i. lingkungan dan budaya.

Adapun menurut BAN S/M Depdiknas, 2007 mengatakan bahwasanya tahapan-tahapan dari proses akreditasi sendiri terdiri dari lima tahapan yaitu

- a. evaluasi diri.
- b. pengajuan akreditasi.
- c. penentuan kelayakan visitasi.
- d. pelaksanaan visitasi.
- e. penetapan hasil.

Adapun dalam penilaian akreditasi itu sendiri ada beberapa komponen yang harus terpenuhi oleh sekolah atau madrasah adapun Komponen Penilaian Akreditasi ialah :

---

<sup>34</sup> Firdaus, *Manajemen Mutu Pendidikan*.

Kriteria-kriteria yang dinilai adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
- b. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
- c. Mahasiswa
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Keuangan, Sarana dan Prasaran
- f. Pendidikan
- g. Penelitian
- h. Pengabdian Kepada Masyarakat
- i. Luaran dan Capaian Tri Dharma

Adapun prosedur dan langkah langkah SPME berbentuk akreditasi pendidikan (formal dan nonformal di Indonesia) sebagai berikut.

- a. Pelaksana akreditasi di Indonesia ada 3, yaitu Badan Akreditasi Nasional-Pendidikan Non Formal (BAN-PNF), Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), dan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- b. SPME berbentuk akreditasi perguruan tinggi hanya dilakukan LAM PS kepada program studi dan BAN-PT kepada institusi, tidak kepada unit kerja dan fakultas. Untuk sementara BAN-PT tetap melakukan akreditasi kepada program studi yang belum ada LAM-PS-nya.
- c. Akreditasi sekolah hanya dilakukan kepada institusi tidak kepada program studi (SMA) atau bidang keahlian (SMK). Akreditasi sekolah dilakukan BAN-S/M dengan pelaksana lapangan adalah Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang ada di setiap provinsi.
- d. Sedangkan BAN PNF melakukan akreditasi kepada lembaga pendidikan nonformal, seperti lembaga kursus dan pelatihan.
- e. Instrumen akreditasi disebut borang. Program studi, institusi, mau pun lembaga kursus dapat mengisi dan/atau menyusun borang, lalu menyerahkannya kepada badan akreditasi terkait dengan menyerahkan pula dokumen evaluasi diri program studi atau institusinya BAN-PT/LAM-PS, BAN-PNF, atau BAN-S/M akan menunjuk Tim Asesor eksternal untuk menilai dan melakukan site visit. Sedangkan BAN-S/M melaksanakan akreditasi melalui BAS yang ada di tiap provinsi.

---

<sup>35</sup> Tutiarny Nibaho, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2021), 104.

- f. Hasil penilaian Tim Asesor dibawa ke sidang Majelis BAN untuk diputuskan dan diberi sertifikat pengakuan atas kinerjanya. Hasil penilaian BAN diikuti pula dengan rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti.<sup>36</sup>

Sedangkan prinsip akreditasi yang harus dipegang yaitu efektif, efisien, obyektif dan mandiri. Sehingga nantinya akreditasi tersebut bisa menjadi titik tambah yang sangat baik terhadap perkembangan manajemen mutu pendidikan di sekolah ataupun di madrasah, yang membuat sekolah ataupun madrasah tersebut masuk katagori kelas Elit.

### C. Kesimpulan

Penjaminan mutu suatu pendidikan bisa di ukur dari standar pendidikan dan akreditasi pendidikan nya, karena dengan adanya komponen keduanya maka manajemen pendidikan di dalamnya akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang dimana dalam proses jamina mutu itu ada beberap statement yang harus di penuhi, begitu juga di dalam akreditasi itu sendiri, yang mana meliputi Prosedur, Penilan dan komponen-komponen yang harus terpenuhi, sehingga nantinya manajemen jaminan mutu pendidikan di lembaga pendidikan akan berkemabnag baik dan mendapat respon yang positif dari lingkungan sekitar lembaga pendidikan tersebut. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat di tindak lanjuti atau di perbaiki ketika masih ada yang masih kurang sesuai, peneliti sangat berharap kritikan yang membangun dan evaluasi supaya bisa menjadi lebih baik lagi.

### Referensi

- Achmad, Ali Nurhadi, Mahfida Inayati. "Analisis Stategi Dalam Pengembangan Rencana Kerja Madrasah." *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 22, no. 2 (2023): 179–86.
- Ahmad. *Manajemen Mutu Terpadu*. Makasar: CV Nas Media Pustaka, 2020.
- Al-Bailawi, Hassan Hussein. *Al-Judah Asy-Syamilah Fi Al-Ta'lim*. Yordania: Dar Al-Masirah, 2006.
- Arbangi. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: PT Adhitiya Andrebina Agung, 2016.
- A. Suhardi. "Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah." *Manajemen Pendidikan Islam* 5, No. 1 (2019).
- Anwar, Khoirul. "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidika Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah." *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan agama islam*, November 2018, 01, No 01.
- Awaluddin, Aulia Ar Rakhman. "Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu upaya Penjaminan Mutu." *Jurnal SAP pendidikan di Indonesia* 2, No. 1 (Agustus 2014).
- Firdaus, Erwin. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: yayasan Kita Menulis,

---

<sup>36</sup> A. Hanif Saha Ghafur, *Arsitektur Mutu Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 108-109.

- 2021.
- Ghafur, A. Hanif Saha. *Arsitektur Mutu Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017.
- Hadi, Abdul. "Konsepsi Manajemen Mutu Dalam Pendidikan." *Jurnal Program Studi PGMI* 5, no. 2 (2018): 140.
- Inayati, Mahfida. "Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning)." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 144–59. <https://www.researchgate.net/publication/320726603>.
- Inayati, Mahfida, Mulyadi, and Ali Nurhadi. "Analisis Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Pesantren Melalui Manajemen Humas." *Evaluas: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 229–42. <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/evaluasi/article/view/1631/pdf>.
- Inayati, Mahfida, and Nurul Zainab. "Pengembangan Bahan Ajar Kerangka TPACK Berbasis Video Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa." *Jurnal Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam* 15, no. 2 (2023): 96–105. <https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia>.
- Mairawan, Danny. "Penjmainan mutu satuan pendidikan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan secara nasional dalam otonomi pendidikan." *Jurnal Educationist* IV, No. 2 (Juli 2010).
- Musyaffa, A.A. *Total Quality Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Madrasah*. Serang: Puri Kartika Banjarsari, 2019.
- Naim, Zaedun. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Nibaho, Tutiarny. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jakarta: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Rachman, Fathor. *Modernisasi Manajemen Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ircisod, 2021.
- Supadi. *Manajemen Mutu Pendidikan*. Jawa Timur: UNJ Press, 2021.
- Sulaiman, Ahmad, dan Udik Budi Wibowo. "Implementasi sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Gajah Mada." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 4, no 1 (April 2016).
- Tuaimah, Rhusdi Ahmad. *Al-Judah Al- Syamilah Fi Al-Ta'lim*. Yordania: Dar Al Masirah, 2006.
- Uchtiwati, Sri, dan Irwani Zawawi. "Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Berstandar Nasional." *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan* 2 no 1 (t.t.): Januari, 2014.